

PEMILU
2024

DEPARTEMEN
KAJIAN DAN ANALISIS ISU STRATEGIS



**APATIS MENYAPA,
APA KABAR
IDEALIS?**

APATISME
POLITIK
GENZ



PENYUSUN KAJIAN

PELINDUNG : BEM UNIVERSITAS UDAYANA

PENANGGUNG :
JAWAB

PENGARAH	:	Fauzan Azhima Mikajavani	FK	2102511131
		Firmansyah Krisna Maulana	FH	2204551508
		Muhammad Raihan Basyar	FEB	2107511108
		Afrianti Nela' Tamben	FH	2204551214
		Deasy Natalia Marena Br. N.	FT	2205511103
		Christy Celistia Daulay	FEB	2107511095
Tim Penulis	:	Rebecca Sevenya Gerarda Sinurat	FH	2304551474
		Alya Milan Difa	FEB	2307511064
		Audrey Davita Ariella	FH	2304551229
		Naohide Kiyosawa	FT	2305531094
		Ida Ayu Putu Satyadewi	FISIP	2312521083

DAFTAR ISI

APATISME POLITIK GEN Z	1
PENYUSUN KAJIAN	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN	4
1.1 Ringkasan Eksekutif.....	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	6
2.1 Kasak-Kusuk Menjelang Pemilu 2024.....	6
2.2 Dosa Pemilu, Melahirkan Apatisme Rakyat	8
2.2.1 Adanya Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah.....	8
2.2.2 Ketidakuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Politik	9
2.2.3 Kekecewaan Terhadap Janji Pemilu yang Tidak Terpenuhi	11
2.2.4 Politik Dianggap Bukan Sesuatu yang Penting Bagi Kehidupan	12
2.3 Urgensi Partisipasi Aktif Pemilih Muda	13
2.4 Langkah Strategis	18
2.4.1 Meningkatkan Pemahaman Rakyat Tentang Pentingnya Pemilu	18
2.4.2 Memfasilitasi diskusi dan debat politik	19
PENUTUP.....	21
3.1 Kesimpulan.....	21
DAFTAR PUSTAKA	23

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang diadakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Setiap pagelarannya selau diwarnai dengan polemik didalamnya, seperti terjadinya apatisme pemilih dalam menentukan pilihannya. Terdapat bukti konkret terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran pemilu di era reformasi ini. Dalam prosesnya, Pemilihan Umum menuntut adanya partisipasi politik dari seluruh warga negara untuk menyuarakan dan menentukan keinginannya secara bebas dan jujur sebagai sumber legitimasinya. Sikap apatis menjadi urgensi dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Berdasarkan Data KPU menyebutkan bahwa partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden 2014 menurun dari tahun sebelumnya. Dimana suara golput mencapai 29,8 persen atau 56.732.857 suara. Padahal pada tahun 2009 angka golput hanya mencapai 27,7 persen. Angka ini bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya 24 persen. Dari data tersebut juga ditemukan fakta bahwa kebanyakan yang tidak menggunakan hak suaranya ialah para pemilih pemula. Problematika tersebut menjadi hal vital dikarenakan mayoritas dari pemilih tahun 2024 adalah sebanyak 55% generasi muda yang baru pertama kali berpartisipasi. Guna menyadarkan kepada generasi muda yang tidak melek politik tentang betapa pentingnya satu hak pilih suara mereka dapat memengaruhi bagaimana masa depan negara Indonesia lima tahun kedepannya.

Menjelang pemilu 2024 sudah banyak isu-isu yang beredar dan permasalahan yang datang. Permasalahan pertama datang dari beban kerja penyelenggara yang sangat berat pada tahun 2024 mendatang, pemilihan 5 tingkat pimpinan meliputi presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh daerah. Selanjutnya terdapat isu yang datang langsung dari dua ketua umum partai politik, yaitu Muhaimin Iskandar selaku Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Zulkifli Hasan selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) tentang penundaan pengadaan pemilu 2024. Tidak hanya itu, aspek pemilih juga menjadi sorotan utama. Rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer, pemilu dan pilkada 2024 diklaim terbesar

di dunia dengan perkiraan total pemilih mencapai 74% dari total populasi Indonesia dan generasi muda menjadi mayoritas pemilih pada tahun 2024. Hal yang dikhawatirkan akan terjadi adalah ancaman dan gangguan dalam hak memilih. Ketegangan ini mendesak Mahkamah Agung merevisi materi pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang menyatakan bahwa kampanye boleh dilakukan di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama mendapatkan izin dari pihak pengelola dan tidak menggunakan atribut kampanye.

PEMBAHASAN

2.1 Kasak-Kusuk Menjelang Pemilu 2024

Indonesia sebagai negara demokrasi akan segera menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 mendatang. Pemilihan akan dilakukan secara langsung, jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia apabila penyelenggara pemilihan menunjukkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Pemilu kali ini menampilkan pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan dipilih 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih.

Pemilu dan pilkada yang tinggal menghitung beberapa bulan, sudah diiringi dengan maraknya isu-isu yang terus mengalir dan sangat penting untuk diperhatikan. Permasalahan beban kerja penyelenggara yang sangat berat pada tahun 2024 mendatang. Bagaimana tidak, pemilihan 5 tingkat pimpinan meliputi presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh daerah. Sembilan bulan kemudian, penyelenggara pemilu harus menyelenggarakan pemilihan gubernur di 33 provinsi (tidak termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta) dan pemilihan bupati/wali kota di 514 kabupaten/kota di seluruh tanah air. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilu dan pilkada tidak hanya berlangsung pada hari pemilu, melainkan merupakan rangkaian tahapan yang panjang. Tentunya, beban kerja ini lebih berat dari tahun sebelumnya.

Permasalahan tersebut menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, tidak terkecuali dari dua ketua umum partai politik, yaitu Muhaimin Iskandar selaku Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Zulkifli Hasan selaku Ketua Partai Amanat Nasional (PAN). Penundaan pemilu menimbulkan banyak protes dari partai politik Indonesia. Penundaan ini disebutkan sebagai aspirasi pengusaha akibat turunya ekonomi ketika pandemi Covid-19. Penundaan juga secara tidak langsung akan memperpanjang masa jabatan Joko Widodo. Namun, Menteri Koordinator bidang

Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Dr. Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membicarakan penundaan pemilu 2024.

Selain beban kerja dan penundaan pemilu 2024, aspek pemilih juga menjadi sorotan utama. Meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer, pemilu dan pilkada 2024 diklaim terbesar di dunia dengan perkiraan total pemilih mencapai 74% dari total populasi Indonesia, dimana kaum muda menjadi mayoritas pemilih pada tahun 2024. Hal yang dikhawatirkan akan terjadi adalah ancaman dan gangguan dalam hak memilih. Ancaman inilah yang kemudian menimbulkan rendahnya partisipasi rakyat dalam menggunakan hak suaranya. Subjek yang menjadi fokus utama adalah mayoritas pemilih dalam pemilu 2024. Diketahui bahwa 55% pengguna suara adalah generasi muda yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya tentu menjadi pusat perhatian pemerintah karena masa depan Indonesia ditentukan oleh mereka. Banyak alasan dan faktor yang menyebabkan rendahnya minat generasi muda dalam menggunakan hak suara mereka. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah generasi muda yang tidak melek politik.

Ketegangan ini mendesak Mahkamah Agung merevisi materi pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang menyatakan bahwa kampanye boleh dilakukan di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama mendapatkan izin dari pihak pengelola dan tidak menggunakan atribut kampanye. Tentunya perubahan ini mendapatkan banyak bantahan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa kampanye pemilu 2024 tidak efektif dilakukan di semua tingkat sekolah. Terutama, kampanye ini dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kampanye juga dianggap tidak penting dilakukan di tingkat PAUD sampai SMA. Hal ini dianggap karena usia mereka yang belum bisa ikut berpartisipasi untuk menggunakan hak suara mereka. Sementara itu, jenjang SMA hanya sedikit siswa yang mencukupi syarat untuk memilih. Tak hanya itu, kampanye politik di fasilitas pendidikan juga dikhawatirkan membuat sekolah menjadi arena pertarungan politik praktis dimana politik partisipan akan dibawa ke ranah sekolah.

Mengurangi banyaknya kemungkinan buruk yang terjadi akibat revisi materi tersebut, KPU menyisipkan pasal 72A ayat (4) yang menyatakan tempat pendidikan adalah tingkat perguruan tinggi. Kampanye pemilu 2024 hanya akan dilakukan di

tingkat universitas, politeknik, akademi, sekolah tinggi dan institut. Namun begitu, kampanye tetap dilakukan dengan memenuhi syarat yang berlaku. Salah satunya metode yang digunakan sebagai upaya kampanye harus dalam bentuk debat ataupun diskusi. Kemudian, apabila universitas mengundang peserta partai maka harus diterapkan perlakuan yang setara dan adil kepada seluruh peserta. Pada dasarnya, kegiatan kampanye pada tingkat perguruan tinggi perlu dilakukan untuk menyadarkan generasi muda dalam menggunakan hak pilihnya yang mana saat ini menjadi urgensi dan fokus utama penyelenggara akibat isu-isu yang mematahkan pola pikir generasi muda bahwa politik tidak penting dan suara mereka tidak akan memengaruhi Indonesia.

2.2 Dosa Pemilu, Melahirkan Apatisme Rakyat

2.2.1 Adanya Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 24–31 Januari 2019 terhadap 1.426 responden dari seluruh Indonesia menunjukkan, 79 persen responden yakin bahwa KPU mampu menyelenggarakan pemilu sesuai dengan regulasi. Sebanyak 79 persen responden juga yakin, Bawaslu dapat mengawasi pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski demikian, hanya 56 persen responden yang tidak percaya terhadap isu KPU tidak netral. Sebanyak 13 persen responden percaya isu ini dan 32 persen responden tidak menjawab. Survei ini memiliki *margin of error* sebesar 2,65 persen. Padahal, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang Survei tersebut juga menunjukkan persebaran opini responden terhadap isu-isu yang terkait dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Mengenai hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta, survei SMRC menunjukkan bahwa 61 persen responden tidak mempercayai isu tersebut. Hanya ada 4 persen responden yang mempercayai dan sisanya tidak menjawab.

Meski demikian, ada sedikit ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hal ini tercermin pada isu kotak suara kardus. Saat ditanya apakah pemakaian kotak suara berbahan karton mempermudah kecurangan pemilu, opini masyarakat

terbelah. Sebanyak 34 persen masyarakat percaya, 36 persen tidak percaya, 30 persen sisanya tidak menjawab. penting dalam proses demokrasi suatu negara. Sejak kampanye dimulai pada akhir September tahun lalu, sudah beberapa isu yang muncul mempertanyakan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu, seperti kasus tujuh kontainer surat suara, puluhan juta data pemilih ganda, dan kotak suara kardus atau karton.

Hadar menyayangkan adanya isu yang menyerang karton sebagai bahan pembuatan kotak surat suara. Menurut Hadar, seharusnya fakta bahwa kotak surat suara berbahan dasar karton tidak dikait-kaitkan dengan masalah keamanan surat suara. Sebab, sistem pengamanan secara holistik memiliki pengaruh yang lebih besar dan harus menjadi perhatian.

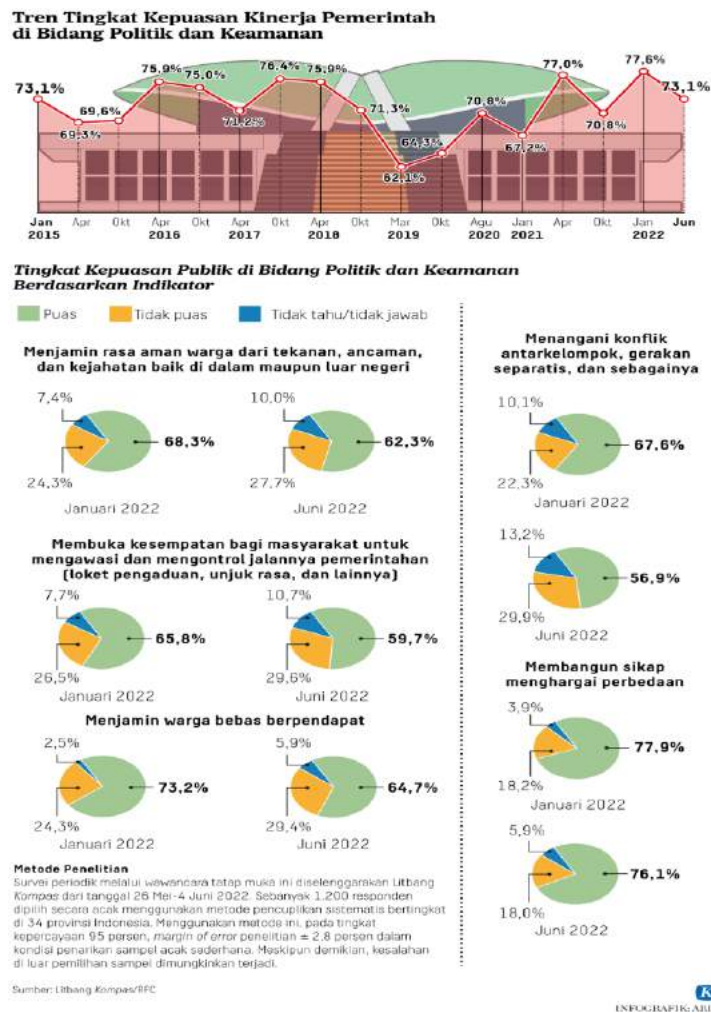
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa pihaknya akan menganggap hasil temuan survei ini sebagai pelecuk untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penindakan agar kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dapat meningkat. Ia berharap, keberadaan petugas pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) yang diterapkan mulai Pemilu 2019 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

2.2.2 Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Politik

Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan tergambar dari hasil survei *Kompas* Juni 2022. Secara umum, tingkat kepuasan publik di bidang polkam tercatat 73,1 persen atau turun 4,5 persen dibandingkan dengan Januari 2022 (77,6 persen), tetapi lebih tinggi daripada Oktober 2021 (70,8 persen). Dilihat dari hasil survei sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo, angka penilaian kinerja polkam kali ini sebenarnya masih tergolong "lumayan". Angka saat ini bahkan sama dengan penilaian publik pada Januari 2015 saat triwulan pemerintahan dinilai masih dalam masa "euforia" pemilu presiden (Pilpres) dan lebih tinggi daripada penilaian pada Maret-Oktober 2019. Meski tergolong lumayan, tingkat penurunan patut menjadi perhatian karena menyentuh aspek mendasar dan terjadi di banyak lini. Hal ini mengindikasikan, dalam lima bulan

terakhir, pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan persoalan polkam di masyarakat.

Aspek yang menurun tajam di antaranya pengendalian konflik-separatisme (turun 11 persen); menjamin kebebasan berpendapat (turun 8 persen); menjamin rasa aman dari kejahatan (turun 6 persen); dan membuka partisipasi masyarakat (turun 6 persen). Hanya aspek kinerja pemerintah dalam membangun sikap menghargai perbedaan yang relatif tetap diapresiasi (turun 2 persen).



Gambar 1. Tren Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan. Source: Kompas

2.2.3 Kekecewaan Terhadap Janji Pemilu yang Tidak Terpenuhi

Tahapan kampanye seharusnya menjadi hal yang paling penting bagi rakyat, dikarenakan para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif memberitahukan kepada warga masyarakat tentang apa yang akan dilakukannya jika kelak dirinya terpilih. Kenyataannya, sebagian besar rakyat tidak lagi memandang penting kampanye bahkan pemilu itu sendiri karena hal ini dianggap tidak lebih dari sekedar rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan mereka. Terjadinya penurunan secara beruntun partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran pemilu di era Reformasi merupakan bukti konkretnya. Bahkan, dalam konteks pilkada, di beberapa daerah jumlah suara golput justru lebih besar daripada suara kemenangan pasangan calon. Alasan mendasar yang melatarbelakangi munculnya kekecewaan masyarakat tersebut akibat janji pemilu yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu, selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai.

Janji kampanye para kontestan pemilu seolah-olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya padahal dari semula janji tersebut (mungkin) telah direncanakan untuk tidak dipenuhi. Maka tidak heran bila sebagian besar rakyat menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan. Pemilu di mata rakyat tidak lebih dari sekedar sebuah ajang tempat orang memberikan janji-janji untuk diingkari. Akibatnya, demokrasi perwakilan di Indonesia saat ini mengalami masalah *disconnected electoral* yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dengan yang diwakili. Sehingga seringkali tindakan yang dilakukan oleh para wakil tidak selaras dengan apa yang menjadi aspirasi

Namun demikian, banyaknya janji-janji palsu dalam kampanye tidak berarti janji politik menjadi tidak penting. Dalam sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang niscaya. Politik tanpa janji adalah politik yang buruk. Setidaknya ada dua arti penting janji politik. Pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Kedua, janji

politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya kelak. Karena itu dalam sistem politik otoriter seorang diktator tidak perlu berjanji kepada siapapun, sebab dia memang tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa juga.

Pemilu sebagai kontrak sosial tentulah menjamin hak dan kewajiban pemilih di satu pihak dan hak serta kewajiban para pemimpin di pihak lainnya. Hak pemilih ialah berdaulat menentukan pilihan yang dioperasikan melalui kebebasan menentukan pilihannya atau tidak memilih siapa pun dan merahasiakannya. Imbangan terhadap hak itu adalah kewajiban, berupa menjatuhkan pilihan kepada calon yang tepat secara benar berdasar pertimbangan bahwa hasilnya akan mendatangkan faedah bagi diri, golongan, masyarakat dan negara. Sebaliknya, para kandidat dalam pemilu berhak mendapatkan suara pemilih sebanyak mungkin, sebagai syarat untuk memperoleh posisi kekuasaan negara yang diinginkan dan diincarnya. Operasionalisasi hak itu memungkinkannya membujuk pemilih dengan cara yang sah dan benar sesuai dengan prinsip persuasi demokratis. Konsekuensinya, adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala upayanya dalam mendapatkan suara pemilih. Lebih dari itu, kandidat pemilu yang berhasil menjadi penguasa berkewajiban melakukan upaya secara sah untuk menunaikan janjinya ketika pemilu. Secara moral, janji adalah sesuatu yang seharusnya secara sungguh-sungguh dipegang untuk kemudian direalisasikan menjadi kenyataan, bukan sebaliknya hanya menjadi instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat. Faktanya, kewajiban moral tersebut tidak benar-benar membentuk komitmen para wakil terpilih untuk mewujudkan janjinya. Sebab itu, perlu ada strategi guna memastikan janji tersebut ditepati.

2.2.4 Politik Dianggap Bukan Sesuatu yang Penting Bagi Kehidupan

1. Partisipasi dalam keterlibatan politik: Sebagian besar masyarakat menganggap pemilu sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan arah kebijakan negara. Namun, ada juga yang kurang tertarik dan

merasa bahwa keterlibatan politik langsung tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan.

2. Pengaruh dalam kualitas hidup: sebagian besar masyarakat mengakui bahwa hasil dari pemilu dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka melalui kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah terpilih. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa faktor ekonomi dan sosial memiliki dampak lebih besar dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya Ketidakpuasan politik Beberapa masyarakat mengungkapkan kekecewaan terhadap sistem politik dan percaya bahwa pemilu tidak mampu menghasilkan perubahan yang nyata. Mereka lebih memilih fokus pada inisiatif lokal dan kelompok masyarakat untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari.
4. Pentingnya Pendidikan Politik mayoritas masyarakat menyatakan bahwa pendidikan politik penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

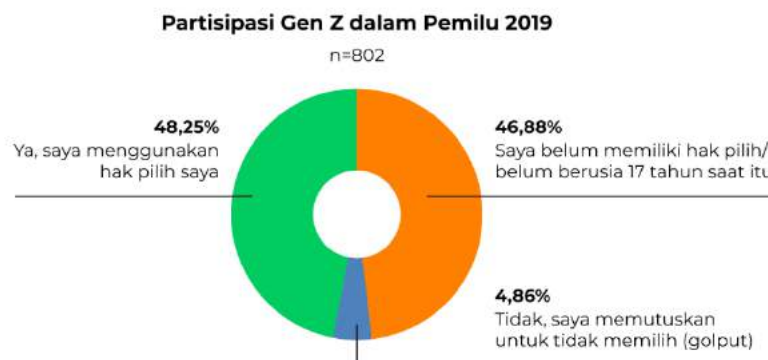
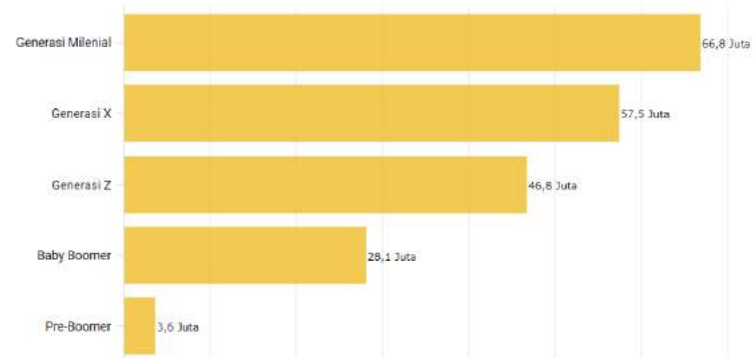
Oleh karena itu, pendidikan politik dan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat keterhubungan antara pemilu dan kehidupan sehari-hari.

2.3 Urgensi Partisipasi Aktif Pemilih Muda

Di bidang data pemilih di Indonesia, terjadi fenomena peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU), menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 171.265.442 pemilih. Pada tahun 2014, KPU melakukan penghitungan DPT yang menghasilkan jumlah sebesar 190.307.134 orang. Peningkatan ini terus berlanjut hingga pada Pemilu 2019, jumlah DPT mencapai angka 192.866.254. Peningkatan angka-angka tersebut menceritakan kisah pertumbuhan jumlah pemilih yang terus-menerus di Indonesia. Berdasarkan catatan KPU, DPT Pemilu 2024 mendatang diperkirakan berjumlah 204.807.222 pemilih. Dari angka yang sangat besar ini, terlihat adanya pergeseran demografi juga. Pada Pemilu 2024 ini, sebanyak 66,8 juta pemilih merupakan generasi milenial, disusul oleh Generasi X

dengan 57,5 juta, Generasi Z yang memiliki jumlah pemilih yang mengesankan, sebanyak 46,8 juta, dilanjut oleh Baby Boomer dengan 28,1 juta dan diakhiri dengan Pre-Boomer yang berjumlah 3.6 juta. Hal ini berarti 55% dari semua pemilih di tahun 2024 adalah anak muda.¹

Grafik 1. Jumlah DPT dalam Pemilu 2024 menurut KPU.



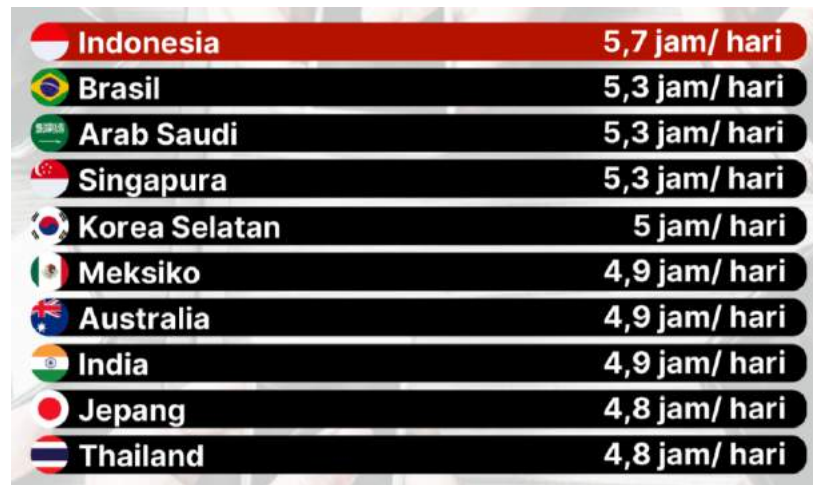
Grafik 2. Partisipasi Gen Z dalam Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019, UMN Consulting menemukan 48,25% Generasi Z menggunakan hak pilih mereka, 4,86% memutuskan untuk golput (golongan putih), dan 46,88% belum memiliki hak pilih pada tahun tersebut. Sekarang, dengan mendekatnya tahun 2024, setengah dari Generasi Z akan memiliki hak pilih dan bisa

¹ Muhammad, N. (2023, July 5). *KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial*. databoks. Url: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>. Diakses tanggal 20 Oktober 2023

mengikuti pemilu pertama mereka.² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memberikan kewajiban kepada warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin untuk mendaftar kepada penyelenggara pemilu. Walaupun terlihatnya seakan-akan Generasi Z akan menggoncangkan Pemilu 2024, realitanya adalah Generasi Z yang memiliki hak pilih untuk Pemilu 2024 belum tentu ingin berpartisipasi.

Gambar 2. Daftar durasi *screen-time* pengguna internet

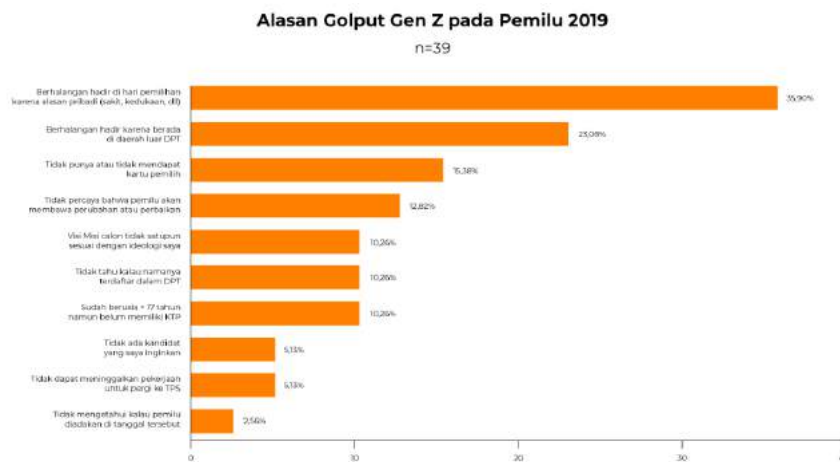


Indonesia memiliki durasi *screen-time* tertinggi saat dibandingkan dengan negara-negara lain dan Generasi Z dan generasi milenial adalah pengguna internet paling lama. Gen Z adalah kelompok tertinggi yang memiliki screen time di atas 6 jam, yakni mencapai 35%, disusul oleh Gen Y atau milenial sebanyak 26%, dan selebihnya Gen X dan Boomers yang hanya 19%. Adanya sebuah stereotip terhadap Generasi Z di mana walaupun Generasi Z bisa menghabiskan banyak waktu di aplikasi media sosial, mereka tidak mengonsumsi media politik sedikit pun. Dengan adanya Twitter, Tik Tok, Instagram dan lainnya, mengonsumsi informasi politik sudah seharusnya menjadi bagian dari *screen-time* tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki apatisme terhadap politik. Hasil temuan survei yang dilakukan Indopol

² Alfianingrum, R. (24 Februari 2023). *Gen Z dan Ancaman Golput di Pemilu 2024*. UMN Consulting. Url: <https://umnconsulting.id/ancaman-golput-gen-z-pemilu-2024/>. Diakses 20 Oktober 2023

menunjukkan bahwa sebanyak 42,32% responden Gen Z dan millennial mengaku jarang menerima informasi politik. Kalaupun mendapatkan link atau pengiriman berita, yang selalu membaca hanya 10,63% dan yang 41,93% tidak menjawab.

Anggota KPU August Mellaz mengaku khawatir masih rendahnya indeks kepercayaan anak muda terhadap partai politik yaitu sebesar 32,67%. Dari survei UMN Consulting mengenai alasan golput Gen Z pada Pemilu 2019, 12,82% menyatakan karena tidak percayanya bahwa pemilu dapat menciptakan perubahan dan tidak sesuai visi-misi paslon tidak sesuai dengan ideologi diri sebanyak 10,26%. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Gen Z sesungguhnya bukan apatis, tetapi cenderung frustrasi karena suara dan aspirasinya tidak didengar. Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat ada 52,7% anak muda mengatakan partai politik atau politisi belum berhasil mewakili aspirasi masyarakat.



Grafik 3. Alasan Golput Gen Z pada Pemilu 2019.

Hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa tingkat golput pada Pemilu 2019 adalah yang terendah sejak tahun 2004, yaitu 19,24%. Melihat dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), persentase golput adalah 23,30% pada 2004, 27,45% pada 2009, 30,42% pada 2014. Di tahun 2019, alasan golput diwakili oleh alasan teknis seperti berhalangan hadir karena alasan pribadi (35,9%), berada di luar wilayah DPT (23,08%), dan tidak/belum mendapatkan kartu pemilih (15,38%). Di Pemilu 2024,

alasan teknis ini memiliki kemungkinan untuk terus menjadi alasan mengapa kebanyakan Generasi Z bisa memilih untuk golput. Tanpa pengembangan sistem dan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan anak muda untuk meminimalisir golput teknis, golput ini berpotensi membawa kerugian berat bagi lingkungan politik Indonesia.

Kelompok golongan putih atau golput memiliki sejarah yang panjang. Mereka lahir sebagai sebuah bentuk protes dari kelompok pemuda dan mahasiswa atas pelaksanaan Pemilu perdana di era Orde Baru, yang digelar pada 5 Juli 1971. Saat itu mereka menilai tidak ada satu pun tokoh politik yang bisa menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka. Sekarang, golongan putih masih sering digunakan dengan cara yang sama. Jika menurut pemilih tidak ada yang dapat mewujudkan ideologi mereka, tidak heran lagi jika mereka memilih untuk golput daripada memilih representasi yang tidak pas.

Menganggap golput sebagai bentuk protes yang sah dapat dibenarkan karena alasan yang logis. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan sikapnya mengenai calon, sistem pemilu, dan ideologi yang berlaku. Seringkali, para kandidat atau pejabat gagal menjunjung tinggi esensi pernyataan mereka. Janji yang dibuat dengan semangat terkadang tidak terpenuhi, seperti janji penciptaan lapangan kerja atau pengentasan kemiskinan, sehingga menyebabkan kalimat menjadi kehilangan maknanya. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kandidat atau pejabat terus menurun.

Oleh karena itu, individu yang merasa kecewa dengan pilihannya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, yang pada dasarnya berarti golput. Selain itu, pemungutan suara tidak menjamin hasil yang baik dalam hal pekerjaan, kesehatan, atau pendidikan. Inilah sebabnya mengapa golput dalam proses pemungutan suara berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan protes. Walaupun dari riset yang dilakukan, jumlah golongan putih bisa dianggap sedikit. Tetapi dengan berjalannya waktu, tanpa perhatian terhadap isu ini, bisa saja angka ini terus meningkat. Selain itu, angka ini bisa membantu kepentingan politik pihak tertentu yang bisa mendapatkan keuntungan dari tidak berpartisipasinya Generasi Z. Atribut Generasi Z, yang dicirikan oleh kemahiran

teknologi, pemikiran kritis, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang memprioritaskan kebaikan yang lebih besar, merupakan kualitas yang menguntungkan dalam skenario ini. Oleh karena itu, mengurangi tingkat abstain pada demografi Gen Z bukanlah suatu tantangan yang tidak dapat diatasi.

2.4 Langkah Strategis

2.4.1 Meningkatkan Pemahaman Rakyat Tentang Pentingnya Pemilu

Persentase tingkat apatisme terhadap politik di kalangan pemuda tergolong tinggi. Persentase tersebut menunjukkan rujukan dari situasi kritis yang Indonesia miliki saat ini, mengingat keberlangsungan pemilu tahun 2024 sendiri diambil alih oleh pemuda pemudi bangsa. Dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.22 jiwa – 55% yang diantaranya merupakan pemilih muda. Politik merupakan topik yang cukup awam dikalangan pemuda, mereka yang aktif mengamati politik biasanya berasal dari para generasi tua (generasi x), alhasil cukup banyak generasi muda (generasi z) yang tidak terangkul untuk mendapatkan informasi terkait politik. Kita membutuhkan sebuah langkah strategis untuk dapat mencapai pemilu yang berkualitas yang berisikan pemilih cerdas dan tahu menahu dengan pilihan mereka.

Mengingat tingginya keterlibatan pemuda pada periode pemilu kali ini, timbulah urgensi untuk meningkatkan tingkat kepekaan terhadap politik. Terdapat beberapa Langkah strategis yang dapat dilakukan, salah satunya media sosial. Melihat fakta bahwa media massa, seperti media cetak, media elektronik dan media online banyak memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pikir, cara pandang, cara tindak dan juga sikap politik seseorang (Efriza, 2021:38). Kita dapat mempergunakan media-media tersebut untuk meningkatkan pemahaman, minat dan ketertarikan terhadap politik, guna tercapainya pemilu yang berisikan pemilih-pemilih cerdas. Salah satu contoh Langkah strategis yang paling efisien adalah mempergunakan platform-platform besar seperti Instagram, Tiktok, Twitter (X),

YouTube, Facebook dan platform lainnya untuk menyebarkan informasi tentang urgensi dari pemilu ini.

Media sosial merupakan institusi baru yang sudah banyak dipercaya oleh pemilih muda, sebagaimana media sosial sudah menjadi salah satu agen sosial yang baru. Studi menunjukkan bahwa media social merupakan sarana penting untuk pembagian informasi bagi pemilih muda. Mayoritas responden – sebanyak 94% mengaku menggunakan informasi dari media sosial sebagai dasar pertimbangan keputusan untuk memilih. Sebanyak 64 persen responden mengatakan akan mengikuti diskusi soal pemilu melalui media social, dengan ini dapat disimpulkan bahwa posisi media social merupakan media pelengkap masa konvensional yang berpengaruh besar terhadap keputusan pemilihan pemilu.

2.4.2 Memfasilitasi diskusi dan debat politik

Para pemilih sebenarnya membutuhkan sebuah wadah juga sarana untuk mangadu gagasan mereka dengan para calon yang ada. Dibutuhkan sebuah fasilitas yang bisa memberikan kesempatan bagi pemilih muda dan calon-calon pemerintah untuk melakukan diskusi secara langsung. Kita membutuhkan sebuah wadah juga fasilitator yang dapat memberikan kesempatan untuk dapat melakukan sebuah diskusi dan ataupun debat politik. Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh kalangan baik pemilih tua maupun pemilih muda untuk dapat merasakan sentuhan dari para setiap calon pemerintahan nantinya.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membuat sebuah debat capres dan cawapres yang dilakukan di kawasan universitas. Universitas memang merupakan tempat yang bersifat netral dan tidak boleh tersentuh oleh kampanye. Tetapi mengapa kita tidak mempergunakan universitas sebagai ajang untuk menguras value, objektivitas dan kedalaman substansi akademik dari setiap calon-calon petinggi nantinya? Mengingat bahwa Universitas adalah salah satu sumber tempat dari setiap aspek-aspek tersebut. Ajang tersebut merupakan sebuah kesempatan emas yang dapat digunakan untuk publik khususnya para kaum muda untuk menggali gagasan dari para

calon. Acara ini juga berpotensi untuk meningkatkan minat para pemuda untuk lebih melek terhadap politik.

United State sendiri bahkan selalu melakukan debat dengan antar calon Presiden dan Wakilnya di Universitas sebelum melakukan voting pemilu. Hal ini dibuat untuk dikarenakan para agen pemerintah mengetahui dengan jelas bahwa suara dari para Mahasiswa dan Mahasiswa itu sangat penting dan berpengaruh. Tingkat pemungutan suara mahasiswa mencerminkan seberapa baik perguruan tinggi dan universitas memenuhi misi kemasyarakatan mereka. Pemberian suara bukanlah satu-satunya indikator, namun merupakan tindakan mendasar dari kewarganegaraan, dan dapat diukur secara obyektif. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa debat pemilu di kawasan universitas dapat memberikan dampak yang cukup signifikan juga bermanfaat bagi pemilu 2024 nanti.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Sebesar 55% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu tahun 2024 adalah generasi muda dan sebagian besar dari mereka baru pertama kali menggunakan hak suara. Namun masih terdapat keinginan untuk tidak ingin berpartisipasi dan menggunakan hak pilih mereka.
2. Potensi apatisisme pemilih muda akan cukup tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu. Potensi sikap apatis didasari oleh berbagai faktor, mulai dari adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dikarenakan banyaknya isu-isu yang beredar, masalah yang hadir di setiap pemilu yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja politik, dan tidak sedikit juga yang menganggap pemilu tidak penting dalam memengaruhi kehidupan. Hal ini yang menjadi urgensi dan fokus utama pemerintah untuk potensi apatisisme yang besar pada generasi muda yang tidak melek politik.
3. Minimnya pendidikan politik dan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat keterhubungan antara pemilu dan kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpedulian terhadap politik.

3.2 Rekomendasi

1. Mempergunakan platform-platform tersebut sebagai sarana kampanye dan menyebarkan informasi. Dikarenakan media massa memiliki peranan penting dalam memengaruhi cara pikir, cara pandang, cara tindak, dan juga sikap politis seseorang. Langkah tersebut bisa menjadi awal yang strategis untuk menangani urgensi potensi sikap apatis dan meningkatkan tingkat kepekaan terhadap politik.
2. Memperluas fasilitas diskusi secara langsung antara pemilih muda dan calon-calon pemerintah, seperti mengadakan debat capres dan cawapres di lingkungan universitas atau perguruan tinggi. Hal ini juga mendorong Mahkamah Agung merevisi pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan KPU menyisipkan pasal 72A ayat (4) dengan mengizinkan kegiatan kampanye pada fasilitas pemerintah

dan perguruan tinggi. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan untuk menyadarkan atau membuka pola pikir generasi muda dan mematahkan potensi apatisme yang tinggi terhadap hak memilih.

DAFTAR PUSTAKA

Alfianingrum, R. (2023, February 24). *Gen Z dan Ancaman Golput di Pemilu 2024*.

UMN Consulting. Url: <https://umnconsulting.id/ancaman-golput-gen-z-pemilu-2024/>. Diakses 20 Oktober 2023

BBC Indonesia. (2023, August 22). *Pemilu 2024: Sekolah dan kampus berisiko jadi*

'ajang kampanye', mengapa dianggap berbahaya? BBC. Url: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce4vx4nlllpo>. Diakses 20 Oktober 2023

CNN Indonesia. (2023, July 17). *Kenaikan Jumlah Pemilih dalam Pemilu 15 Tahun*

Terakhir. CNN Indonesia. Url: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230716215553-617-974142/kenaikan-jumlah-pemilih-dalam-pemilu-15-tahun-terakhir>. Diakses 20 Oktober 2023

JPNN. (2023, October 11). *Analisis Agus Widjajanto Soal Situasi Politik Menjelang*

Pemilu 2024. JPNN.com. Url: <https://www.jpnn.com/news/analisis-agus-widjajanto-soal-situasi-politik-menjelang-pemilu-2024>. Diakses 20 Oktober 2023

Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggara Pemilu Harus Ditingkatkan. (2019,

March 10). Kompas.id. Url: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/10/kepercayaan-publik-terhadap-penyelenggara-pemilu-harus-ditingkatkan>. Diakses 20 Oktober 2023

Muhammad, N. (2023, July 5). *KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok*

Gen Z dan Milenial. databoks. Url:

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial)

[2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial). Diakses 20 Oktober 2023

Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Bawaslu*, 3, 1-11.

<https://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL%20MENGAPA%20INTEGRITAS%20ITU%20PENTING.pdf>

Rendongan, S. (n.d.). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*.

JDIH KPU RI. Url: https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf.

Diakses 20 Oktober 2023

Wisanggeni, S. (2019). *Survei Litbang "Kompas": Gejolak Politik Mengikis Apresiasi*

Publik. (2022, June 20). Kompas.id. Url:

[https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/19/gejolak-politik-mengikis-](https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/19/gejolak-politik-mengikis-apresiasi-publik)

[apresiasi-publik](https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/19/gejolak-politik-mengikis-apresiasi-publik). Diakses 20 Oktober 2023

Tufts University. (n.d.). *Why College Student Voting Matters | National Study of*

Learning, Voting and Engagement. Institute for Democracy & Higher

Education. Url: [https://idhe.tufts.edu/about-us/our-work/why-college-student-](https://idhe.tufts.edu/about-us/our-work/why-college-student-voting-matters)

[voting-matters](https://idhe.tufts.edu/about-us/our-work/why-college-student-voting-matters). Diakses 20 Oktober 2023